

ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Tata Kelola kebijakan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) di Kabupaen Gayo Lues dengan begitu kita mengetahui tujuan kebijakan tersebut, kemudian mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan sejauhmana pula keterlibatan LSM; (2) Mengungkapkan peran lembaga pelaksana Qanun Nomor 13 Tahun 2003, dengan begitu kita mengetahui peran masing-masing lembaga dan mengetahui bagaimana hubungan antar lembaga penyelenggara kemudian hubungan dengan masyarakat dan LSM. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Deskriptif Kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi masyarakat, LSM dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 tahun 2003 serta hubungan antar lembaga pelaksanaanya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi yaitu mengamati kondisi obyektif dilapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) di Kabupaten Gayo Lues dengan mendokumentasikannya.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 belum berjalan dengan baik, karena dalam proses pelaksanaan kebijakan Qanun tersebut dilapangan belum adanya interaksi yang melibatkan masyarakat secara utuh, belum adanya hubungan sama sekali dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Kedua*, upaya yang dilakukan Pemerintah mengikut adilkan masyarakat dengan cara membentuk (PPSK) dan juga hanya tiga kecamatan yang dibentuk dari sebelas jumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Qanun ini belum memberikan perubahan secara signifikan terbukti masih terjadinya perjudian di tengah-tengah masyarakat seperti sabung ayam dan judi togel. *Ketiga*, Hubungan antar lembaga pelaksana Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 dilapangan belum ada satu peraturan, qanun Kabupaten maupun MOU yang mengatur hubungan kerja, ketiga lembaga ini seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. *Keempat*, Nilai ke islaman sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Gayo Lues dengan hukum adatnya di setiap kampung, dengan adanya lembaga Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Serta Mahkamah Syariah kemudian pembentukan PPSK seakan-akan menghilangkan peran Hukum Adat itu sendiri.

Penelitian ini merekomendasikan: *Pertama*, lembaga pelaksana mengikut adilkan masyarakat dan LSM secara aktif di segala proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 ini. *Kedua*, agar Pemerintah Daerah Gayo Lues dalam hal ini Bupati Gayo Lues membentuk PPSK diseluruh kecamatan yang berjumlah sebelas kecamatan dan menerbitkan Surat Instruksi Bupati tentang Tindak Lanjut Surat Keputusan Nomor: 451/414/2009 Tanggal 22 juni 2009 tentang pembentukan PPSK. *Ketiga*, Hubungan antar lembaga tersebut bisa di tetapkan melalui Peraturan Bupati atau MoU antar ketiga lembaga tersebut disertai dengan butir-butir kesepakatan kemudian diketahui oleh Bupati Gayo Lues. *Keempat*, lembaga pelaksana kebijakan Qanun Nomor 13 tahun 2003 mensosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Serta peran masyarakat di PPSK.

Kata Kunci: Tata Kelola Kebijakan dan Hubungan Antar Lembaga.

ABSTRACT

The title of this research is government policy Qanun Nomor 13 in 2003 about Maisir (gambling) at regency of Gayo Lues in Aceh province. The purpose of this research: (1) To know the government policy Qanun Nomor 13 in 2003 about Maisir (gambling) in regency of Gayo Lues so that we know the purpose of policy. Then to know how far involvement of society in process of the formulation and also how far of the involvement of LSM; (2) Expressing the role of the implementation institute of Qanun No. 12 in 2003 so we can know the role of each institute and to know how the relation among the institutions manager then the relation with society and LSM. This research used qualitative descriptive method approach to get the obvious depiction regarding society participation, LSM in implementation of Qanun Nomor 13 in 2003 and the relation among the institutions' manager. Therefore, the technique in collecting the data that used is observation technique which is observe the objects condition in the field, interview the performers who involved in implementing Qanun Nomor 13 in 2013 about Maisir (gambling) in regency of Gayo Lues with record it in a document.

The result concludes that: *First*, the government policy Qanun Nomor 13 in 2003 did not work well, because the process of the implementations policy Qanun does not have the relation with LSM. *The second*, the effort done by the government get involved in society by forming PPSK and three sub-districts formed out of eleven sub-districts in Gayo Lues. Qanun did not give significant adjustment, it can be proved with the gambling is still taken place among the society such as sabung ayam and judi Togel. *TheThird*, the relation among policy implementation institute of Qanun Nomor 13 in 2003 in field do not have any regulation Qanun regency and MOU that manage job relation, the third of this institute is like walking one by one without any coordination. *The fourth*, the value of Islamic religion has civilized in the middle of society in Gayo Lues regency with law of tradition in each hometown. Because of Islamic Syariat department institute, the police of Pamong Praja and Wilayatul Hisbah with Syariah court, as if the formation of PPSK lost the role of law it self.

Therefore this research recommended: *First*, the manager institute taken place of society and LSM actively in all the process policy Qanun Nomor13 in 2003. *The second*, in this matter regent of Gayo Lues formed PPSK in whole sub-district in number of eleven sub district and published instruction letter of regent about the follow up to the decree No. 451/414/2009 on June 22nd 2009 about formation of PPSK. *The third*: the relation among that institute can be determined through regulation of regent or MOU among that institute along with agreement then known by regent of GayoLues. *The fourth*: policy implementation institute of Qanun Nomor 13 in 2003 socialized role, function to the society in PPSK.

Keywords: Government Policy and The Relation Of Institute